

## Pemprov dan DPRD Kaltim Sepakati Rancangan KUA-PPAS 2025



Sumber gambar : [Kaltimpost.co.id](http://Kaltimpost.co.id) Jumat, 26/07/2024

**SAMARINDA** – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni menghadiri Rapat Paripurna Ke-20 DPRD Kaltim dengan agenda utama penandatanganan kesepakatan bersama antara DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 di Gedung BDPRD Kaltim, Karang Paci, Kamis (25/7).

“Syukur *alhamdulillah* dapat dirampungkan sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal Badan Musyawarah DPRD,” kata Sri Wahyuni membacakan sambutan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik.

Dokumen perencanaan anggaran ini dapat dijadikan pedoman arah pengalokasian anggaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk mewujudkan pemenuhan layanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Menjadi harapan kita bersama KUA dan PPAS 2025 yang disepakati dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025,” imbuhnya.

Penyusunan KUA dan PPAS APBD 2025, lanjut dia, merupakan momentum pemulihan pertumbuhan ekonomi yang diprioritaskan pada kewajiban daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

“Ekonomi Kaltim tahun 2024 dan 2025 diperkirakan tetap tumbuh positif namun masih terbatas,” tegas Sri.

Proyek pembangunan fisik IKN akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltim. Pertumbuhan yang positif mendatang didukung oleh peningkatan kinerja di industri pengolahan minyak yang diperkirakan akan lebih tinggi, seiring aktivitas masyarakat yang makin menggeliat.

Tenaga kerja Kaltim akan terserap, kebutuhan ribuan pekerja di IKN pasti akan berhubungan dengan petani dan pedagang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk akomodasi baik hotel maupun penginapan juga akan laku karena banyak tamu untuk berbisnis maupun berdinis.

“Pelaku UMKM juga akan terdampak penjualan produk meningkat,” urainya.

Kesepakatan terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2025 sebesar Rp21 triliun. Dengan rincian pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp20,01 triliun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp10,03 triliun, pendapatan transfer Rp9,86 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp202,05 miliar.  
(her/sul/ky/adv/rdh)

**Sumber berita:**

1. KaltimPost, Pemprov dan DPRD Kaltim Sepakati Rancangan KUA-PPAS 2025, 26/07/24

**Catatan:**

Dalam Pasal 89 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur sebagai berikut:

- (1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
- (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. kondisi ekonomi makro daerah;
  - b. asumsi penyusunan APBD;
  - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
  - d. kebijakan Belanja Daerah;
  - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
  - f. strategi pencapaian.
- (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
  - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
  - b. menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
  - c. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.